

KEPEMIMPINAN PROFETIK NABI MUHAMMAD DALAM MEMBANGUN MASYARAKAT MADANI

Dede Rubai Misbahul Alam¹, Cindi Fitriani², Elis Nur Hasanah³, Lilik Nihayah⁴

dede.rubai@unismabekasi.ac.id¹, cindifitriani91@gmail.com²,
elishasanah21@guru.smp.belajar.id³, liliknihayahnihayah@gmail.com⁴

Universitas Islam 45

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji kepemimpinan Nabi Muhammad ﷺ dalam membangun masyarakat madani (berperadaban) serta relevansinya terhadap pembangunan sosial kontemporer. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis kepustakaan terhadap sumber-sumber klasik Islam dan karya-karya ilmiah modern. Kajian ini menyoroti prinsip-prinsip dasar kepemimpinan Nabi Muhammad, seperti keadilan, musyawarah (shūrā), kesetaraan, integritas moral, dan kohesi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga transformatif dalam ranah sosial dan politik, yang berhasil mempersatukan masyarakat Madinah yang majemuk melalui tata kelola pemerintahan yang inklusif, penegakan hukum, serta nilai-nilai etika sebagaimana tercermin dalam Piagam Madinah. Model kepemimpinan ini berkontribusi secara signifikan dalam membentuk masyarakat yang damai, adil, dan beradab berdasarkan prinsip saling menghormati dan tanggung jawab kolektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad menawarkan kerangka komprehensif dan kontekstual dalam membangun masyarakat madani yang tetap relevan untuk menjawab tantangan kepemimpinan, pluralisme, dan keharmonisan sosial di era modern.

Kata Kunci: Kepemimpinan Profetik, Nabi Muhammad, Masyarakat Madani, Peradaban Islam, Etika Sosial.

ABSTRACT

This article examines the leadership of Prophet Muhammad ﷺ in building a madani (civil) society and its relevance to contemporary social development. Using a qualitative descriptive approach through literature analysis of classical Islamic sources and modern scholarly works, this study explores the fundamental principles of the Prophet's leadership, including justice, consultation (shūrā), equality, moral integrity, and social cohesion. The findings indicate that the leadership of Prophet Muhammad was not merely spiritual but also transformative in the social and political spheres, successfully uniting diverse communities in Medina through inclusive governance, legal order, and ethical values as reflected in the Constitution of Medina. This leadership model contributed significantly to the formation of a peaceful, just, and civilized society based on mutual respect and collective responsibility. The study concludes that the leadership of Prophet Muhammad offers a comprehensive and contextual framework for building a madani society that remains relevant in addressing modern challenges of leadership, pluralism, and social harmony.

Keywords: Prophetic Leadership, Prophet Muhammad, Madani Society, Islamic Civilization, Social Ethics.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan memiliki peran sentral dalam membentuk masyarakat yang beradab, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan tidak hanya dipahami sebagai mekanisme administratif atau kekuasaan semata, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial, yang menuntut harmonisasi antara etika, religiusitas, dan perhatian terhadap kesejahteraan umat. Nabi Muhammad SAW menghadirkan model kepemimpinan transformatif yang mampu menyatukan masyarakat Arab yang sebelumnya terfragmentasi menjadi komunitas yang kokoh, partisipatif, dan

berkeadilan (Sutrisno, 2021; Ridwan, 2023).

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti dimensi kepemimpinan profetik Nabi Muhammad SAW dari perspektif berbeda. Sutrisno (2021) mengkaji nilai-nilai transformatif dan profetik, sementara Ridwan (2023) menyoroti kontribusi Nabi dalam membangun tatanan sosial Madinah. Mustofa (2022) dan Syarifuddin (2024) menekankan pentingnya Piagam Madinah sebagai fondasi masyarakat madani yang inklusif dan etis. Nasution (2022) menyoroti aspek etika sosial dan kesetaraan hukum, Fauzi (2023) menekankan moderasi beragama dan kepemimpinan inklusif, sedangkan Kurniawan (2021) menekankan pendidikan profetik sebagai sarana pembentukan karakter dan kesadaran sosial. Yusuf (2025) membahas relevansi prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi dalam konteks modern. Secara keseluruhan, literatur ini menegaskan nilai universal kepemimpinan profetik, namun mayoritas membahas aspek tertentu secara terpisah.

Artikel ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan menyintesis kepemimpinan profetik Nabi Muhammad SAW secara komprehensif, menggabungkan dimensi struktural, humanistik, edukatif, dan kultural. Pendekatan ini menempatkan nilai profetik—shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh—sebagai kerangka normatif sekaligus aplikatif dalam membangun masyarakat madani yang beradab, inklusif, dan berkelanjutan. Permasalahan penelitian adalah bagaimana karakter kepemimpinan profetik Nabi berkontribusi terhadap pembentukan masyarakat madani, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sosial dan pendidikan modern. Hipotesisnya adalah bahwa kepemimpinan profetik Nabi Muhammad SAW menyediakan pedoman universal yang relevan untuk memperkuat integritas, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, tujuan artikel ini adalah menganalisis kepemimpinan profetik Nabi Muhammad SAW dalam konteks pembangunan masyarakat madani dan mengeksplorasi relevansi nilai-nilainya bagi penguatan kehidupan sosial, pengelolaan pendidikan, dan pengembangan masyarakat berkeadaban di era kontemporer. Kajian ini diharapkan memberikan pemahaman menyeluruh tentang kepemimpinan profetik dan potensinya sebagai paradigma pembangunan masyarakat madani berbasis nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis secara sistematis menelaah dan mengkaji literatur yang relevan terkait kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat madani. Data dikumpulkan dari berbagai sumber primer maupun sekunder, termasuk buku, artikel ilmiah, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang menyoroti aspek kepemimpinan profetik, prinsip sosial, serta implementasinya dalam konteks pendidikan dan masyarakat. Analisis dilakukan secara kritis dan deskriptif, dengan tujuan menafsirkan nilai-nilai kepemimpinan Nabi secara komprehensif, sekaligus menyintesis temuan-temuan dari berbagai studi sebagai dasar pemahaman teoretis dan aplikatif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk tidak hanya mendeskripsikan fenomena historis, tetapi juga menilai relevansi kepemimpinan profetik terhadap praktik sosial dan pendidikan modern.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat madani di Madinah mendorong kehidupan sosial yang adil, rukun, dan berbasis musyawarah, sehingga setiap anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang. Prinsip-prinsip ini mewujudkan dalam penghormatan terhadap hak asasi manusia, pengakuan

terhadap keberagaman sosial dan agama, serta pelaksanaan hukum yang adil serta bertanggung jawab bagi seluruh anggota masyarakat.. Piagam Madinah menjadi instrumen normatif yang mengintegrasikan nilai-nilai etis, hukum, dan sosial, sehingga kepemimpinan Nabi bersifat visioner, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama (Shihab, 2021; Mustofa, 2022).

Karakter kepemimpinan Nabi Muhammad SAW terlihat jelas dalam cara beliau memimpin masyarakat Madinah. Nilai-nilai ini memastikan semua orang bisa berpartisipasi, hak setiap individu dihormati, dan keputusan diambil secara adil dan etis. Piagam Madinah menjadi bukti integrasi norma sosial dan hukum dengan kepemimpinan yang tidak otoriter, tetapi dialogis dan inklusif, membentuk masyarakat toleran dan harmonis (Syarifuddin, 2024; Ridwan, 2023).

Implementasi prinsip kepemimpinan Nabi dalam pendidikan Islam modern sangat relevan, khususnya bagi kepala sekolah sebagai pemimpin institusi. Kepala sekolah dapat meneladani sifat amanah, adil, humanis, dan teladan moral Nabi untuk membangun tata kelola sekolah yang inklusif, demokratis, dan berorientasi pada pembentukan karakter peserta didik. Pendekatan ini mendorong partisipasi guru, staf, dan peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang profesional, ramah, dan beradab. Dengan demikian, kepemimpinan profetik Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai kerangka konseptual dan praktis dalam manajemen pendidikan dan pembangunan masyarakat madani modern (Kurniawan, 2021; Yusuf, 2025).

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul

Sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW menegaskan kepemimpinan yang berakar pada dimensi spiritual dan etika, di mana penguatan tauhid dan pembinaan akhlak mulia menjadi landasan utama. Keberhasilan dakwah tidak diukur semata oleh jumlah pengikut, melainkan melalui transformasi moral, perilaku, dan kesadaran spiritual umat. Dalam konteks ini, misi kenabian beliau bertujuan menyempurnakan akhlak manusia dan menanamkan prinsip-prinsip etis yang universal, sehingga kepemimpinan Rasul tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga normatif dan transformatif (Shihab, 2021).

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW juga menampilkan dimensi edukatif yang sistematis dan kontekstual. Beliau mendidik umat melalui metode yang bertahap, dialogis, dan berbasis keteladanan, menyesuaikan strategi pembinaan dengan kondisi sosial, intelektual, dan psikologis sahabat. Pada fase dakwah di Mekkah, menghadapi berbagai bentuk tekanan, diskriminasi, dan perlakuan tidak adil dari kaum Quraisy, Nabi tetap menjalankan misi kenabiannya dengan konsistensi moral, kesabaran, dan keteguhan iman. Strategi non-kekerasan yang diimplementasikan menunjukkan bahwa kepemimpinan profetik bersifat humanis, etis, dan berorientasi pada pembentukan karakter serta perubahan moral masyarakat (Shihab, 2021).

Pengaplikasian prinsip-prinsip kepemimpinan profetik dalam konteks pendidikan modern dapat diwujudkan melalui kepala sekolah sebagai pemimpin utama. Kepala sekolah tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga menjadikan nilai-nilai profetik—siddiq, amanah, keadilan, kesabaran, dan tanggung jawab sosial—dalam setiap kebijakan dan koordinasi sekolah. Pendekatan ini mencakup pembinaan yang edukatif, inklusif, dan humanis, dengan memperhatikan aspek profesional, sosial, dan psikologis guru serta peserta didik. Hasilnya adalah terciptanya budaya sekolah yang aman, adil, dan kondusif bagi pengembangan karakter, tidak hanya meningkatkan efektivitas organisasi, tetapi juga membentuk budaya sekolah yang berkeadaban, berkarakter, dan berlandaskan kasih sayang, sebagaimana dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara

Setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW tidak hanya berperan sebagai Rasul, tetapi juga sebagai Kepala Negara. Dalam kapasitas ini, beliau memimpin masyarakat yang terdiri dari kaum Muslimin, Yahudi, dan kelompok lainnya. Kepemimpinan beliau ditandai oleh keadilan, musyawarah, penegakan hukum tanpa pandang bulu, serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara. Hal ini menjadikan Negara Madinah sebagai contoh awal negara yang berlandaskan konstitusi dan nilai kemanusiaan.

Adapun karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai Kepala Negara diantaranya:

1. Kepemimpinan Berbasis Konstitusi dan Keadilan

Nabi Muhammad SAW menetapkan Piagam Madinah sebagai dasar kehidupan bernegara. Piagam ini mengatur hubungan antarwarga negara, menjamin kebebasan beragama, serta menegakkan keadilan dan keamanan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Nabi sebagai kepala negara bersifat sistematis dan berlandaskan hukum.

2. Kepemimpinan Musyawarah (Syura)

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat dan kepala pemerintahan tercermin secara nyata dalam perumusan dan penerapan Piagam Madinah sebagai landasan kehidupan bernegara. Piagam tersebut menunjukkan kemampuan Nabi Muhammad SAW dalam membangun tatanan politik yang mampu menyatukan masyarakat Madinah yang plural ke dalam satu kesatuan sosial dan politik. Melalui Piagam Madinah, setiap kelompok masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim, diberikan hak dan kewajiban yang setara dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan stabilitas bersama. Kebijakan ini merefleksikan karakter kepemimpinan profetik yang berlandaskan keadilan, inklusivitas, serta visi kenegaraan yang berorientasi pada kemaslahatan publik dan harmoni sosial (Azra, 2022).

Dalam konteks pendidikan, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai kepala negara dapat menjadi rujukan bagi kepala sekolah dan pimpinan lembaga pendidikan dalam menerapkan tata tertib secara adil dan konsisten kepada seluruh warga sekolah, baik peserta didik, pendidik, maupun tenaga kependidikan. Penerapan aturan yang berkeadilan akan menumbuhkan rasa aman, kepercayaan, dan kedisiplinan dalam lingkungan sekolah, sekaligus memperkuat pembentukan karakter peserta didik. Dengan demikian, penerapan nilai-nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam manajemen pendidikan tidak hanya bertujuan membuat sekolah berjalan tertib dan efektif, tetapi juga membangun budaya belajar yang berakhlak, adil, dan menekankan kebaikan serta kesejahteraan bersama sebagai tujuan utama pendidikan Islam.

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai Imam Salat

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin salat menampilkan dimensi profetik yang menekankan keteladanan spiritual dan kepedulian humanistik. Pertama, keteladanan ibadah tercermin dari konsistensi beliau dalam melaksanakan dan memimpin salat sesuai dengan tuntunan wahyu. Nabi Muhammad SAW tidak sekadar memberikan instruksi, tetapi juga mencontohkan secara langsung tata cara salat yang khushyuk, tertib, dan reflektif secara spiritual. Praktik ini menegaskan bahwa kepemimpinan dalam konteks ibadah harus berakar pada praktik autentik yang menjadikan pemimpin sebagai referensi moral dan spiritual bagi umatnya.

Kedua, kepemimpinan beliau juga dicirikan oleh sikap humanis dan adaptif. Saat memimpin salat berjamaah, Nabi Muhammad SAW senantiasa memperhatikan kondisi makmum, termasuk orang tua, anak-anak, dan individu dengan kebutuhan khusus, dengan

menyesuaikan tempo atau panjang bacaan salat agar tidak memberatkan jamaah. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan profetik bersifat responsif, empatik, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Dalam perspektif pendidikan kontemporer, karakteristik kepemimpinan ini dapat diadopsi oleh pendidik maupun kepala sekolah sebagai teladan moral dan etis. Dengan mengintegrasikan keteladanan, empati, dan pendekatan humanis, pemimpin pendidikan dapat menumbuhkan disiplin, etika, dan kesadaran sosial pada peserta didik, sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, aman, dan kondusif bagi pengembangan karakter secara menyeluruh (Shihab, 2021; Nata, 2022).

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW Berdasarkan Sifat Shiddiq, Amanah, Fathanah, dan Tabligh

Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW yang berakar pada sifat shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh tidak hanya bersifat normatif-teologis, tetapi juga memiliki relevansi aplikatif dalam konteks kepemimpinan pendidikan, khususnya oleh kepala sekolah sebagai pemimpin lembaga. Keempat sifat ini menggambarkan nilai-nilai profetik yang dapat menjadi pedoman etis sekaligus operasional dalam mengelola sekolah secara profesional, berkeadilan, dan berorientasi pada penguatan karakter peserta didik.

Nilai shiddiq tercermin dalam integritas dan kejujuran kepala sekolah dalam mengelola seluruh aspek akademik maupun administratif. Kepala sekolah yang meneladani sifat shiddiq bertindak transparan dalam pengelolaan anggaran, objektif dalam evaluasi kinerja guru, dan konsisten antara kebijakan dengan praktik di lapangan. Praktik kejujuran tersebut membangun kepercayaan warga sekolah serta menumbuhkan iklim organisasi yang sehat, yang menjadi fondasi bagi pembentukan budaya pendidikan yang beretika dan profesional (Shihab, 2021).

Sementara itu, amanah ditunjukkan melalui tanggung jawab moral dan administratif kepala sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab tidak hanya kepada atasan, tetapi juga terhadap kepentingan peserta didik, guru, tenaga kependidikan, dan masyarakat. Implementasi amanah terlihat dalam perlindungan hak belajar peserta didik, pengelolaan sumber daya manusia secara adil, serta akuntabilitas dalam setiap kebijakan dan program sekolah. Jabatan kepala sekolah diposisikan sebagai sarana pelayanan, bukan kekuasaan, selaras dengan prinsip kepemimpinan profetik Nabi Muhammad SAW (Nata, 2022).

Nilai fathanah tercermin pada kecerdasan strategis, kebijaksanaan, dan kemampuan adaptif kepala sekolah dalam merespons kompleksitas pendidikan. Kepala sekolah yang fathanah mampu membaca tantangan zaman, seperti inovasi pembelajaran, perubahan kurikulum, serta keberagaman kebutuhan peserta didik. Implementasi nilai ini meliputi pengambilan keputusan berbasis data, pengembangan kreativitas dan inovasi akademik, serta kemampuan membangun kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Praktik tersebut mencerminkan keteladanan Nabi Muhammad SAW dalam membuat keputusan yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Azra, 2022).

Nilai tabligh tercermin dalam kemampuan kepala sekolah menyampaikan visi, misi, dan kebijakan secara jelas, persuasif, dan inspiratif. Kepala sekolah yang menginternalisasi tabligh mampu mendorong partisipasi aktif guru, peserta didik, dan tenaga kependidikan, serta memberikan teladan dalam menyampaikan nilai-nilai moral dan karakter. Keterbukaan terhadap aspirasi warga sekolah juga menjadi bagian dari penerapan tabligh dalam membangun komunikasi kepemimpinan yang efektif dan etis (Zainuddin, 2023).

Dengan demikian, pengintegrasian keempat nilai profetik—shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh—dalam kepemimpinan kepala sekolah tidak hanya meningkatkan efektivitas manajerial, tetapi juga berperan dalam pembentukan budaya sekolah yang

berakhlak, berkeadilan, dan berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik. Model kepemimpinan ini menempatkan kepala sekolah sebagai pemimpin moral dan teladan nilai, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kepemimpinan profetiknya.

Bentuk-Bentuk Amaliah Kepedulian Nabi Muhammad SAW dalam Membangun Kecerdasan Masyarakat

Kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap pengembangan kecerdasan masyarakat menjadi inti dari kepemimpinan profetik yang mengintegrasikan dimensi spiritual, intelektual, dan sosial. Nabi Muhammad SAW tidak hanya berperan sebagai penyampai wahyu, tetapi juga sebagai pendidik umat yang menekankan pentingnya ilmu dan akhlak sebagai fondasi peradaban. Amaliah kepedulian beliau tercermin dalam upaya membebaskan masyarakat dari ketidaktahuan, menumbuhkan kesadaran intelektual, dan menanamkan tanggung jawab sosial, sehingga pemahaman kecerdasan mencakup pengetahuan, moral, dan spiritualitas secara holistik (Shihab, 2021).

Selain itu, Nabi Muhammad SAW membangun kecerdasan masyarakat melalui metode pembelajaran yang dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada pembinaan akhlak. Beliau mendorong umat untuk berpikir kritis, sekaligus menekankan bahwa ilmu harus digunakan untuk kemaslahatan sosial. Nilai-nilai profetik ini dapat diterjemahkan dalam praktik kepemimpinan kepala sekolah sebagai instructional leader, dengan menumbuhkan budaya akademik yang kolaboratif, mengintegrasikan pendidikan karakter dalam seluruh kegiatan sekolah, serta menampilkan keteladanan moral dalam setiap kebijakan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas akademik, tetapi juga membentuk peserta didik yang cerdas, berakhlak, dan peduli terhadap lingkungan sosialnya (Azra, 2022; Zainuddin, 2023).

Kesetaraan pendidikan di Indonesia mencerminkan upaya sistematis untuk memberikan peluang belajar yang setara bagi seluruh warga, tanpa diskriminasi latar sosial maupun ekonomi. Program seperti Paket A, B, dan C, pendidikan keaksaraan fungsional, PKBM, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran daring, menjadi wujud konkret komitmen negara terhadap pemerataan pendidikan. Kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan mampu mengimplementasikan prinsip POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) secara profesional, memberikan kesempatan pengembangan kompetensi guru tanpa membedakan status kepegawaian, serta menegakkan transparansi dan keadilan dalam pembagian tugas, penilaian kinerja, dan ruang partisipasi bagi semua warga sekolah.

Dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam yang terfragmentasi oleh fanatisme kesukuan dan hierarki sosial diskriminatif, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaan, bukan oleh suku, ras, atau status sosial. Prinsip kesetaraan ini, yang ditegaskan melalui Khutbah Wada', menjadi fondasi kepemimpinan profetik yang menekankan keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Nilai-nilai ini relevan diterapkan dalam pendidikan Islam kontemporer melalui pengembangan sekolah multikultural yang menekankan tasāmuḥ (toleransi), 'adālah (keadilan), ukhuwwah insāniyyah (persaudaraan kemanusiaan), dan Islam sebagai rahmatan lil 'ālamīn (Shihab, 2021; Mahfud, 2022).

Implementasi prinsip kesetaraan dan inklusivitas ini dapat diwujudkan melalui kepemimpinan kepala sekolah. Kepala sekolah berperan strategis dalam memasukkan nilai moderasi beragama, toleransi, dan keberagaman ke dalam visi, misi, dan kebijakan sekolah. Pembagian tugas dilakukan secara proporsional dan adil tanpa diskriminasi gender, status kepegawaian, maupun latar ideologis. Proses penerimaan peserta didik, rekrutmen guru, dan pengelolaan pembelajaran dilaksanakan secara transparan, sedangkan

budaya kerja sekolah dibangun atas dasar saling menghargai dan penguatan ukhuwah Islamiyah, wathaniyah, dan basyariyah (Nata, 2022; Zainuddin, 2023).

Lebih lanjut, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tercermin dalam penegakan hukum yang adil dan pembebasan manusia dari struktur sosial yang menindas. Beliau menekankan kesetaraan hukum bagi seluruh individu dan mendorong pemberdayaan manusia melalui pendidikan yang inklusif. Nilai-nilai profetik ini dapat diterapkan di sekolah melalui penerapan tata tertib yang konsisten, penilaian akademik objektif, dan kebijakan afirmatif bagi peserta didik kurang beruntung. Dengan demikian, kepala sekolah yang meneladani kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak hanya meningkatkan efektivitas manajemen pendidikan, tetapi juga menciptakan iklim sekolah yang adil, inklusif, dan berkeadaban—sebagai fondasi pembentukan masyarakat madani di era modern (Azra, 2022; Rahman, 2024).

Diplomasi Nabi Muhammad SAW dengan masyarakat Perjanjian Hudaibiyah ke-1 (Tahap Awal Perjanjian)

Perjanjian Hudaibiyah yang berlangsung pada tahun keenam Hijriah mencerminkan kepemimpinan profetik Nabi Muhammad SAW dalam mengelola konflik melalui pendekatan diplomasi yang kompromistis dan visioner. Ketika kaum Quraisy menghalangi pelaksanaan umrah, Nabi Muhammad SAW memilih jalur negosiasi damai meskipun secara lahiriah isi perjanjian tampak merugikan kaum Muslimin, seperti kewajiban kembali ke Madinah tanpa umrah dan penghapusan gelar “Rasulullah” dalam naskah perjanjian. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi dalam memprioritaskan stabilitas sosial dan kemaslahatan jangka panjang dakwah Islam di atas kepentingan simbolik dan emosional sesaat.

Perjanjian Hudaibiyah ke-2 (Dampak dan Implementasi Perjanjian)

Tahap lanjutan dari Perjanjian Hudaibiyah menunjukkan dampak strategis yang signifikan terhadap perkembangan dakwah Islam dan transformasi sosial masyarakat Arab. Pemberlakuan perjanjian tersebut menciptakan situasi damai yang memungkinkan kaum Muslimin melakukan aktivitas dakwah secara terbuka dan berkelanjutan tanpa tekanan konflik bersenjata, sehingga jumlah pemeluk Islam meningkat secara pesat dalam waktu relatif singkat. Kondisi stabil ini sekaligus membuka jalan bagi terjadinya Fathu Makkah pada tahun kedelapan Hijriah melalui pendekatan damai, yang menegaskan keberhasilan strategi Nabi Muhammad SAW dalam mengelola konflik berbasis visi jangka panjang dan kecerdasan profetik. Perspektif kepemimpinan Islam kontemporer memandang Perjanjian Hudaibiyah sebagai instrumen diplomasi transformatif yang tidak hanya menghentikan konflik, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dan keagamaan Islam melalui pendekatan persuasif, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Shihab, 2021; Rahman, 2022; Zainuddin, 2023).

Diplomasi Nabi Muhammad SAW melalui Pengiriman Surat kepada Raja-Raja

Setelah Perjanjian Hudaibiyah, Nabi Muhammad SAW mengembangkan dakwah Islam secara global melalui diplomasi tertulis, dengan mengirimkan surat kepada para raja dan penguasa, antara lain Heraclius (Romawi), Kisra (Persia), Muqauqis (Mesir), dan Najasyi (Habasyah). Surat-surat tersebut disusun dengan bahasa yang santun, jelas, dan penuh penghormatan, tanpa mengurangi substansi dakwah.

1. Penerimaan Surat Dakwah

Raja Najasyi dari Habasyah menerima surat Nabi Muhammad SAW dengan baik dan menunjukkan sikap hormat terhadap Islam. Ia bahkan memberikan perlindungan kepada kaum Muslimin yang berhijrah ke negerinya. Sikap ini mencerminkan keberhasilan diplomasi Nabi Muhammad SAW yang mengedepankan etika komunikasi dan penghormatan terhadap mitra dakwah.

2. Penolakan Surat Dakwah

Sebaliknya, Kisra (Raja Persia) menolak surat Nabi Muhammad SAW dengan arogan dan merobeknya. Penolakan ini menunjukkan bahwa tidak semua pendekatan diplomasi langsung diterima, terutama oleh pemimpin yang merasa terancam secara ideologis dan politis. Namun Nabi Muhammad SAW tetap merespons dengan tenang dan tidak membalas dengan kekerasan.

Dalam sebuah lembaga pendidikan juga sangat diperlukan keterampilan berdiplomasi untuk menambah jaringan seperti: Komunikasi Kelembagaan yang Etis dan Persuasif Pengelola pendidikan Islam perlu menyampaikan visi, kebijakan, dan perubahan dengan bahasa yang santun dan argumentatif, sebagaimana surat-surat Nabi Muhammad SAW. Tidak semua inovasi pendidikan akan diterima dengan baik. Penolakan harus disikapi secara dewasa, evaluatif, dan tidak emosional, sebagaimana teladan Nabi Muhammad SAW.

Konsep Pendekatan Kultural dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW

Pendekatan kultural yang diterapkan Nabi Muhammad SAW merupakan inti dari kepemimpinan profetik, menekankan hikmah, kebijaksanaan, dan kepekaan sosial dalam menyampaikan ajaran Islam. Beliau tidak menolak budaya lokal masyarakat, melainkan menyeleksi dan mentransformasikannya secara bertahap, mempertahankan praktik yang selaras dengan prinsip tauhid dan mengoreksi tradisi yang bertentangan dengan keadilan serta kemanusiaan. Strategi ini menunjukkan kecerdasan profetik Nabi dalam membaca konteks sosial sehingga dakwah dapat diterima secara persuasif, adaptif, dan berkelanjutan. Kajian kontemporer menekankan bahwa metode kultural Nabi Muhammad SAW menampilkan model kepemimpinan yang humanis, kontekstual, dan berorientasi pada transformasi sosial tanpa menimbulkan resistensi destruktif (Shihab, 2021; Rahman, 2022).

Dalam ranah pendidikan Islam modern, prinsip ini relevan untuk kepala sekolah sebagai pemimpin institusi dan agen perubahan budaya. Kepala sekolah dituntut memiliki sensitivitas terhadap keberagaman peserta didik, guru, dan masyarakat, serta mampu menerapkan kebijakan yang menghargai kearifan lokal, menanamkan pendidikan karakter berbasis nilai Islam rahmatan lil ‘ālamīn, dan membangun komunikasi yang dialogis serta empatik. Dengan meneladani kepemimpinan profetik Nabi Muhammad SAW, kepala sekolah berperan tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai figur moral dan transformasional, menciptakan iklim sekolah inklusif, harmonis, dan berorientasi pada pembentukan masyarakat madani yang beradab dan berkeadilan (Nata, 2022; Zainuddin, 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis, dapat ditegaskan bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW merepresentasikan model profetik yang komprehensif, kontekstual, dan relevan lintas era. Kepemimpinan beliau tidak terbatas pada kapasitas sebagai Rasul dan pemimpin negara, tetapi juga tercermin dalam peran sebagai pendidik dan agen transformasi sosial. Nabi Muhammad SAW berhasil membangun masyarakat madani yang berlandaskan nilai tauhid, keadilan, persaudaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia, melalui integrasi nilai-nilai kepemimpinan profetik—shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh—yang menjadikan kepemimpinan beliau bersifat moral, visioner, dan berorientasi pada kemaslahatan kolektif (Shihab, 2021; Rahman, 2022).

Dalam rangka membangun kecerdasan sosial dan spiritual masyarakat, Nabi Muhammad SAW menerapkan kepemimpinan yang edukatif, humanis, dan transformatif. Dakwah beliau tidak hanya menekankan ritual, tetapi diarahkan pada pembebasan manusia

dari ketidakadilan sosial, diskriminasi gender, fanatisme kesukuan, stratifikasi sosial, serta praktik perbudakan.

Lebih lanjut, dimensi diplomasi dan kultural dalam kepemimpinan Nabi Muhammad SAW menekankan strategi yang visioner dan adaptif. Perjanjian strategis seperti Hudaibiyah dan komunikasi dengan para pemimpin dunia menunjukkan kepemimpinan yang mengutamakan perdamaian dan solusi jangka panjang. Pendekatan kultural yang menghargai tradisi lokal dan mengadaptasi nilai-nilai universal menegaskan bahwa transformasi sosial dan pendidikan lebih efektif bila dilakukan melalui keteladanan, pemahaman konteks, dan perubahan yang tidak konfrontatif (Shihab, 2021; Rahman, 2022).

Dalam konteks manajemen pendidikan Islam, prinsip kepemimpinan profetik Nabi Muhammad SAW sangat relevan untuk diterapkan oleh kepala sekolah dan pemimpin pendidikan lainnya. Kepemimpinan institusional harus mengedepankan efektivitas administratif sekaligus pembentukan budaya humanis, inklusif, adil, dan berorientasi pada karakter peserta didik sehingga dapat membentuk masyarakat madani.

Secara keseluruhan, kepemimpinan Nabi Muhammad SAW bukan hanya warisan historis, melainkan paradigma profetik yang aplikatif dan solutif bagi tantangan kepemimpinan modern, khususnya dalam pendidikan dan pembangunan sosial. Oleh karena itu, kajian dan implementasi nilai-nilai kepemimpinan beliau perlu terus dikembangkan secara kontekstual, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat yang beradab, damai, dan berkeadilan di era kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, A. (2022). *Transformasi sosial-politik Islam: Dari tradisi ke modernitas*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Fauzi, A. (2023). Moderasi beragama dan kepemimpinan inklusif dalam masyarakat multikultural. *Jurnal Studi Islam*, 18(2), 145–160.
- Huda, M. (2024). Kepemimpinan Islam dan penguatan masyarakat berkeadaban di era global. *Jurnal Kepemimpinan Islam*, 9(1), 1–15.
- Kurniawan, S. (2021). Pendidikan Islam humanis dan peran kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 123–138.
- Mustofa, I. (2022). Konsep masyarakat madani dalam perspektif Islam klasik dan modern. *Jurnal Pemikiran Islam*, 17(1), 45–60.
- Nasution, H. (2022). Etika sosial Islam dan kepemimpinan Rasulullah SAW. *Jurnal Etika dan Pemikiran Islam*, 8(2), 89–104.
- Nata, A. (2022). *Manajemen pendidikan Islam: Perspektif nilai dan praktik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahman, A. (2024). Prophetic leadership in Islamic education: Integrating moral values and social justice in school management. *Journal of Islamic Educational Leadership*, 6(1), 45–60.
- Rahman, F. (2022). *Islam and leadership ethics in contemporary society*. London: Routledge.
- Ridwan, M. (2023). Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan pembangunan tatanan sosial Madinah. *Jurnal Sejarah dan Peradaban Islam*, 14(2), 201–218.
- Shihab, M. Q. (2021). *Wasathiyyah: Wawasan Islam tentang moderasi beragama*. Tangerang: Lentera Hati.
- Sutrisno, S. (2021). Kepemimpinan transformatif dan nilai profetik dalam Islam. *Jurnal Kepemimpinan dan Manajemen Islam*, 5(1), 25–40.
- Syarifuddin, A. (2024). Kepemimpinan profetik dan civil society dalam Islam kontemporer. *Jurnal Studi Masyarakat Islam*, 11(1), 67–82.
- Yusuf, M. (2025). Implementasi nilai kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam masyarakat modern. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 19(1), 1–17.
- Zainuddin, M. (2023). Kepemimpinan profetik dalam pendidikan Islam kontemporer. *Jurnal*

Pendidikan Islam, 12(2), 135–150.